

LIBERALISASI

by Winarti .

Submission date: 28-May-2020 09:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 1333162559

File name: BERALISASI__PERTANIAN__ANCAM__KETAHANAN_PANGAN_banjarnegara.doc (46K)

Word count: 1824

Character count: 12467

**LIBERALISASI PERTANIAN MENGANCAM KETAHANAN
PANGAN**
(AGRICULTURAL LIBERALIZATION THREATEN FOOD SECURITY)

DR. WINARTI, MSi

PROGRAM PASCASARJANA
9 UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA
JL. SUMPAH PEMUDA NO. 18 KADIPIRO SURAKARTA

ABSTRAK

Negara diciptakan untuk melindungi rakyat akan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan hak-hak budaya rakyat, sehingga kegagalan negara dalam melindungi rakyat pada dasarnya juga merupakan akibat dari telah dilucutnya negara untuk memenuhi amanat konstitusi untuk melindungi rakyat. Hasilnya saat ini negara telah terjat dalam lingkungan kebijakan global neoliberalisme yang memaksa negara sekadar sebagai wasit dalam permainan kompetisi bebas antara perusahaan-perusahaan transnasional.

Indonesia telah masuk dalam pusaran tersebut, diawali dari Revolusi Hijau yang pada dasarnya adalah masalah dominasi ideologi dan budaya, kekuasaan pengetahuan, persoalan kebebasan politik dan tatanan ekonomi.

Tatanan ekonomi yang liberal, menyebabkan Indonesia sangat tergantung kepada asing. Salah satu bukti ketergantungan di sektor pertanian adalah penyediaan bibit, pupuk yang tidak lagi dapat dibuat sendiri, namun penyediaan bahan pokok disektor pertanian ini diproduksi oleh perusahaan multinasional. Ketergantungan di sektor pertanian sangat mempengaruhi ketahanan pangan bangsa ini.

Kata Kunci : Liberalisasi, Multinasional, Revolusi hijau.

PENDAHULUAN

Menurut Sri Mulyani, persoalan besar dunia saat ini adalah masalah energi, masalah pangan dan masalah lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim global, ke depan negara – negara di dunia harus memikirkan tiga persoalan besar tersebut (Harian Bisnis Indonesia: 2 Juni 2010).

Indonesia tidak terlepas dari persoalan besar tersebut, persoalan ini dapat mengancam kebersamaan dan keberadaan kehidupan bangsa, terutama permasalahan pangan. Persoalan ketahanan pangan selalu menjadi perdebatan para pembuat kebijakan, yang harus melakukan beberapa pilihan antara menjaga stok pangan, dengan melakukan import beras atau memilih meningkatkan produksi beras dengan intensifikasi dan perluasan lahan pertanian.

Untuk Indonesia ketahanan pangan harus selalu dijaga melalui peningkatan produksi beras, ini harus dilakukan agar Indonesia tidak tergantung terhadap negara lain (luar negeri), yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas harga, karena negara harus mempunyai kedaulatan dibidang pangan. Dan kedaulatan dibidang pangan akan terjadi apabila ada komitmen yang besar dari para pembuat kebijakan beserta para *stakeholder*.

Rakyat Indonesia mempunyai hak atas pangan, sehingga pangan menjadi masalah yang sangat penting. Sehingga perlu daya upaya untuk menjamin terselenggaranya ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat, ketahanan pangan menjadi topik perhatian yang serius, karena menyangkut kebutuhan dasar (*basic need*) hidup seseorang. Berbicara masalah ketahanan pangan tidak terlepas dari sektor pertanian, demikian juga bicara masalah pertanian tidak bisa meninggalkan wilayah perdesaan.

LIBERALISASI PERTANIAN

Pada awal tahun 1970 sampai tahun 1980-an hampir semua negara berkembang melakukan perubahan ide-ide pembangunan yang mengarah kepada kebijakan ekonomi, kebijakan ekonomi domestik maupun internasional. Negara–negara berkembang

mengadopsi reformasi liberalisasi ekonomi, yang efeknya jelas mengarah pada menurunnya kepercayaan dunia internasional terhadap peran pemerintah dalam urusan perekonomian, dan lebih percaya kepada pasar.

Liberalisme pada mulanya adalah ekspresi ideologis perjuangan kaum borjuis dalam menghadapi kaum konservatif, sehingga dapat dikatakan liberalisme merupakan ideologi kaum borjuis kota. Pada dasarnya ideologi ini memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas), dan percaya pada kekuatan pasar (*power of market*) untuk menyelesaikan masalah – masalah sosial ketimbang paket-paket kebijakan regulasi atau intervensi pasar oleh negara (Fakih 2003, dalam Khudori, 2004, 16).

Sektor pertanian terkena imbas atas pilihan ideologi liberalisme ini, negara “memaksakan” kehendaknya untuk merubah perilaku, pandangan dan ideologi para petani yang awalnya tradisional menjadi modern. Salah satu strategi dalam penerapan teori pertumbuhan ekonomi adalah Revolusi hijau. Revolusi Hijau yang mensyaratkan penggunaan mesin-mesin (Traktor, racemil), varietas unggul, penggunaan pupuk kimia yang sudah dapat dipastikan dengan berbagai intervensi pemerintah melalui berbagai program (seperti Inmas, Bimas).

Liberalisasi pertanian mempunyai akses baik positif maupun negatif, pada awalnya liberalisasi sektor pertanian memang berdampak pada tersedianya bahan pangan (beras), kira-kira tahun 1980-an Indonesia menjadi negara swasembada pangan, bahkan Indonesia memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan Internasional – FAO. Namun sisi negatifnya dari Revolusi Hijau ini kehidupan masyarakat pedesaan khususnya mengalami *Disharmonisasi*, meningkatnya kemiskinan di daerah pedesaan, urbanisasi meningkat serta *represi* politik terhadap kaum petani.

Liberalisasi pertanian, yang berdampak pada *Disharmonisasi*, yang nampak disegala bidang kehidupan para petani yang semula *Guyub*, kegotong royongan, sosial berubah menjadi individualistik, semua diukur dengan uang. Orientasi produksi telah berubah ke pasar dalam arti, yang pada awalnya untuk kebutuhan sendiri / keluarga namun saat ini produksi untuk dijual, dan bahkan langsung kepada pemilik modal (Kapitalis).

Perubahan semacam ini telah disampaikan Polanyi yang menyatakan bahwa : kapitalisme merupakan sebuah anomali sejarah, karena sementara pengaturan-pengaturan ekonomi pada masa-masa sebelumnya “tertanam” didalam hubungan-hubungan sosial, dibawah kapitalisme, situasinya menjadi terbalik hubungan - hubungan sosial didefinisikan hubungan ekonomi (Polanyi,2003,vii).

DAMPAK LIBERALISASI PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN

Liberlisasi di sektor pertanian, menyebabkan terjadinya ketergantungan bagi negara – negara berkembang kepada negara industri. Ketergantungan ini terutama pada penyediaan/pengadaan bibit, yang saat ini para petani tidak bisa membuat/ menyediakan bibit secara mandiri, mereka harus membeli pupuk, bibit kepada Balai Benih. Ketergantungan semacam ini tanpa disadari diciptakan dan secara legal formal pemerintah mendukung, melalui berbagai kebijakan. Liberalisasi sektor pertanian meningkatkan ongkos produksi pertanian, ironisnya petani tidak bisa menentukan harga produksi pertanian, sehingga peningkatan produksi tidak menyebabkan peningkatan pendapatan petani, namun semakin banyak petani yang terjerat utang. Stigma petani identik dengan kemiskinan ternyata tidak dapat lepas, data Badan Pusat Statistik, menginformasikan bahwa per bulan Maret 2012 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 29,13 juta orang. Jumlah ini sebagian besar tinggal di daerah perdesaan yaitu 18, 94 juta orang, yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian.

Persoalan pertanian menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan yang serius, tulisan Profesor Bustanul Arifin di *Kompas*, 21 Mei 2012 yang menyoroti tiga point kegentingan di sektor pertanian yaitu : Penurunan Produksi, Komersialisasi Lahan dan Kelemahan Implementasi Kebijakan. Dan menurut Prof Ahmad Erani Yustika, menambahkan bahwa ada tiga fakta yang mesti diumumkan agar persoalan tersebut dapat diatasi yaitu

1. Penurunan produksi terjadi bersamaan dengan liberalisasi (sektor pertanian)
2. Lahan persawahan terus menyusut, tetapi area perkebunan makin meluas.

3. Peningkatan produksi tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan petani, jika tidak dikaitkan dengan transformasi ekonomi. (Kompas, 31 Mei 2012).

Isu ketahanan pangan menjadi perhatian internasional saat ini, isu tersebut ditandai oleh naiknya harga pangan dunia, masalah pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan sebagai faktor produksi utama. Di Jawa Tengah saja penyusutan tanah dalam kurun waktu 5 tahun (2001 – 2006) telah terjadi penyusutan lahan sawah (potensial) yang cukup signifikan yaitu sebesar 8.164 Ha. Lahan di Indonesia cukup tersedia, yang menjadi masalah adalah penyusutan lahan pertanian potensial karena adanya alih fungsi ke non pertanian. Tidak adanya komitmen dan regulasi yang mampu melindungi lahan pertanian membuat fungsi sosial tanah bergeser ke fungsi ekonomi yang mengikuti hukum pasar.

Ketimpangan yang menyangkut perbedaan persepsi dan konsepsi, yakni terdapat perbedaan pandangan antara pendekatan legalistik dan pandangan fungsional penggunaan lahan pertanian. Ketimpangan tersebut terjadi ketika tatacara penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tidak memperhatikan aspek apa yang telah lama di praktekkan oleh masyarakat.

Land reform yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, tidak dijalankan oleh rezim Orde Baru, padahal *land reform* yang dilandasi oleh pemikiran *Founding Father* negara Indonesia Soekarno Hatta. Yang memiliki ide pemikiran sebagai berikut :

"Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah, tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk gendut karena menghisap keringat orang-orang diserahi menggarap tanah itu. Jjangan kira lanreform yang hendak kita laksanakan adalah komunis! Hak milik atas tanah masih kita akui! Orang masih boleh punya tanah turun temurun. Hanya luasnya milik itu diatur baik maksimumnya maupun minimumnya, dan hak milik atas tanah iak miliktu l, dan negara kesatuan-kesatuan masyarakat hukum memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada kita nyatakan fungsi sosial, dan negara dan kesatun-kesatuan masyarakat hukum memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada hak milik perseorangan". (Soekarno, 1960)

"Indonesia di masa mendatang mau menjadi negeri yang makmur. Supaya rakyatnya dapat serta pada kebudayaan dunia dan ikut serta mempertinggi peradaban. Untuk mencapai kemakmuran rakyat di masa datang politik perekonomian mestilah disusun di atas dasar yang ternyata sekarang, yaitu Indonesia sebagai negeri agraria. Oleh karena tanah faktor produksi yang terutama, maka hendaknya peraturan milik tanah memperkuat kedudukan tanah sebagai sumber kemakmuran bagi rakyat umumnya" (Mohammad Hatta, 1943).

14
Apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini telah mengalami perubahan yang drastis ketika rejim Orde Baru berkuasa. Sehingga menimbulkan bermacam-macam 4 krisis yaitu krisis keadilan, krisis alam dan krisis produktifitas (Sangkoyo, 2000; Zakaria, 2001).

Krisis keadilan menyangkut tindakan penguasaan berbagai kelompok sosial rakyat terhadap tanah beserta tumbuhan dan apa saja yang terkandung dibawahnya, berbagai usaha dan organisasi beserta kehidupan di atas tanah . Di satu sisi 1 krisis ini ditandai oleh semakin banyak rakyat yang menjadi pengungsi-pengungsi pembangunan, sebagai akibat hilangnya penguasaan mereka terhadap tanah dan kekayaan alam. Dan disisi lain tanah dan sumber daya alam mereka usahakan secara eksklusif oleh badan-badan raksasa atas nama pembangunan. Krisis keadilan inilah yang mkenyebabkan merosotnya kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh menurunnya penghasilan.

Krisis alam yang terjadi saat ini, lebih disebabkan sebagai akibat dari ulah manusia yang serakah sehingga melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Peran para kapitalis terhadap kerusakan alam sangat besar, mereka mengais keuntungan dari sumber-sumber daya alam yang kita miliki, kondisi ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, sehingga tidak mengherankan kalau kerusakan lingkungan ekosistem terganggu dan mengalami kerusakan.

1
Krisis produktivitas rakyat menyangkut mandeknya kemampuan usaha (productive forces), rakyat mengubah tanah dan sumber daya alam menjadi barang yang berguna 6 baginya dan barang yang dapat dipertukarkan disatu pihak dan perusahaan raksasa merubah tanah dan sumber daya alam menjadi modal dalam sistem produksi yang sama sekali asing bagi rakyat setempat. Sehingga terjadi transformasi sosial yang

sangat mengganggu kehidupan masyarakat, hilangnya modal sosial salah satu akibat dari semua itu.

Kebijakan publik yang memihak masyarakat rupanya menjadi barang mahal saat ini, liberalisasi dalam kebijakan pertanian yang telah menjadi pilihan negara ini, sehingga, negara agraris namun mengimport padi, buah-buahan, sayuran, dan juga kedelai, kebutuhan pokok masyarakat kita telah berada di tangan swasta (kapitalis) dan kalau kondisi ini terus berlangsung akan membahayakan kehidupan bangsa, karena ketahanan pangan merupakan faktor yang sangat menentukan dan mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi dan politik.

SIMPULAN

Liberalisasi sektor pertanian, paling terasa ketika rejim Orde Baru, dengan diawali dengan revolusi hijau, sebagai efek langsung dari revolusi hijau ini terjadi *disharmonisasi* dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Lebih lanjut liberalisasi menyebabkan beberapa krisis, yaitu krisis keadilan, yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan petani, krisis alam yang ditandai dengan kerusakan ekosistem, sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam oleh pengusaha-pengusaha multinasional. Dan krisis produktivitas, sebagai akibat hilangnya penguasaan mereka terhadap tanah dan kekayaan alam.

Liberalisasi pertanian menyebabkan menurunnya produksi pertanian, sebagai akibat dari menyusutnya lahan pertanian yang dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terutama untuk industrialisasi. Menurunnya produksi akan mengancam ketahanan pangan.

Liberalisasi sektor pertanian, menyimpang dari cita-cita *founding father*, yang mempunyai semboyan bahwa, tanah untuk kemakmuran bangsa sendiri, dan tanah memiliki fungsi sosial. Dan untuk mencapai kemakmuran rakyat di masa datang, politik perekonomian disusun atas dasar Indonesia sebagai negeri agraria/pertanian.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kebijakan Pertanian, sangat menentukan ketahanan pangan bangsa ini. Kemandirian dan keberanian untuk melakukan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama.

KEPUSTAKAAN

- 10
Khudori, 2004, Neoliberalisme Menumpas Petani, Menyingkap Kejahatan Industri Pangan, Resist Book, Yogyakarta.
- 5
Polanyi, Karl, 2003, Transformasi Besar. Asal – usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- 11
Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.

Laporan Badan Pusat Statistik 02 Juli 2012.

Kompas , 21 Mei 2012

Kompas , 31 Mei 2012

Harian Bisnis Indonesia 2 Juni 2010

LIBERALISASI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

yohanessupriyadi.blogspot.com

Internet Source

3%

2

unspress.uns.ac.id

Internet Source

3%

3

segeringjiwo.wordpress.com

Internet Source

3%

4

id.123dok.com

Internet Source

2%

5

ejurnal.itenas.ac.id

Internet Source

2%

6

bhotghel.wordpress.com

Internet Source

1%

7

www.scribd.com

Internet Source

1%

8

kpa.or.id

Internet Source

1%

9

anzdoc.com

Internet Source

1%

10	ummahonline.wordpress.com Internet Source	1%
11	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
13	rumahradhen.files.wordpress.com Internet Source	<1%
14	flpunhas.blogspot.com Internet Source	<1%
15	es.scribd.com Internet Source	<1%
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
17	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On